

ANALISIS KEBIJAKAN REHABILITASI LAHAN MELALUI PEMBANGUNAN HUTAN RAKYAT PADA CABANG DINAS KEHUTANAN WILAYAH I BOGOR

Analysis of Land Rehabilitation Policy through Community Forest Development Program at the Regional Forestry Branch Office of Bogor

Gita Pujasari*, Dian Fajarwati, Cecep Abd. Qoyum, Yuliandri Hanafi, Hadi Firmansyah, dan Rico Prihatono

(Diterima 2 Juni 2025 / Disetujui 22 Juni 2025)

ABSTRACT

The increasing rate of land degradation in West Java has led to the expansion of critical land areas, which in turn threatens environmental sustainability. One of the strategic efforts to address this issue is through Forest and Land Rehabilitation (FLR) programs, particularly by promoting community-based forest development or "Hutan Rakyat" outside designated forest areas. This study aims to analyze the policy strategies for rehabilitating critical land outside forest areas through community forest development in the jurisdiction of the Forestry Branch Office Region I of West Java Province. The research employs SWOT analysis to identify internal strengths and weaknesses, as well as external opportunities and threats influencing the effectiveness of the policy. Findings reveal various supporting factors, such as government funding, the presence of forest farmer groups, and available guidelines, alongside constraints including unclear land tenure status, limited technological adoption, and insufficient data accuracy. The analysis suggests a combination of strategic approaches, including collaboration with Jakarta's government, engagement of youth, partnerships with academics, and the establishment of legal frameworks to ensure sustainability. These strategies are expected to enhance the effectiveness and efficiency of critical land rehabilitation efforts and contribute to environmental conservation and rural development.

Keywords: community forests, critical land, environmental policy, land rehabilitation, SWOT analysis

Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Bogor Jawa Barat, Jalan Raya Pajajaran No 3, RT.04/RW.05, Tegalega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16129

*Penulis korespondensi: Gita Pujasari

e-mail: pujasarigita@gmail.com

PENDAHULUAN

Degradasi hutan yang terjadi serta banyaknya lahan kritis memberikan berbagai macam efek buruk, sehingga diperlukan upaya rehabilitasi hutan dan memperbaiki lahan kritis tersebut (Brown 1994). Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan rehabilitasi Hutan dan Lahan, Lahan Kritis adalah lahan yang berada di dalam dan di luar kawasan hutan yang telah menurun fungsinya sebagai unsur produksi dan media pengatur tata air DAS. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan guna meningkatkan fungsi hutan lahan guna meningkatkan daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Lahan Nomor : SK.49/PDASRH/PPPDAS/DAS.0/12/2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022, Provinsi Jawa Barat memiliki lahan kritis seluas 829.556 Ha. Berdasarkan data Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RURHL-DAS) Tahun 2022-2032, sasaran rehabilitasi lahan selama 10 tahun untuk Provinsi Jawa Barat adalah 532.318,04 Ha. Sementara itu sasaran Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Jawa Barat dalam 1 tahun adalah 60.881 Ha dengan pola pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk pola penanaman Agroforestry sebesar 56.742 Ha dan Hutan Rakyat sebesar 2.726 Ha.

Rehabilitasi hutan dan lahan terdiri atas rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi Hutan dilakukan pada kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang dibebani hak, dan oleh pemegang hak pada lahan yang dibebani hak. Rehabilitasi lahan dilakukan melalui kegiatan Penghijauan dan/atau Penerapan Teknik Konservasi Tanah. Penghijauan dilakukan melalui pembangunan Hutan Hak, Hutan Kota dan/atau Penghijauan Lingkungan. Pembangunan Hutan Hak dilakukan melalui Pembangunan Hutan Rakyat.

Salah satu tujuan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 adalah “Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan” yang memiliki enam sasaran yang salah satunya adalah meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Strategi dalam mewujudkan sasaran dan tujuan tersebut adalah melalui Peningkatan Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup secara Berkelanjutan yang dijabarkan ke dalam empat arah kebijakan yang diantaranya adalah melalui Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis. Selain itu, dalam rangka mendukung pengarusutamaan (mainstreaming) pelaksanaan pembangunan rendah karbon sebagai platform baru pembangunan, Provinsi Jawa barat melaksanakan Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon yang terbagi pada 3 (tiga) basis bidang dan terbagi atas 5 (lima) sektor yaitu :

1. Bidang berbasis lahan, meliputi sektor kehutanan dan pertanian;
2. Bidang berbasis energy, meliputi sektor energy dan transportasi; dan
3. Bidang berbasis pengelolaan limbah, meliputi sampah dan air limbah domestik.

Pada sektor kehutanan upaya yang dilakukan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon tersebut dilakukan meliputi penanaman, rehabilitasi hutan dan lahan, serta perlindungan hutan.

Berdasarkan hal tersebut kebijakan Pengelolaan Hutan Rakyat dalam rangka mendukung program Rehabilitasi Hutan dan Lahan menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan salah satu Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024 yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa. Hal ini dikarenakan akar permasalahan kemiskinan diantaranya dikarenakan belum optimalnya pembangunan Infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan. Isu pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Tantangan terbesar pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur lainnya (Wulandari & Inoue 2021), adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan yang perlu tetap dipertahankan. Permasalahan utama kualitas lingkungan hidup Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran air, termasuk air laut, pencemaran udara, serta pengendalian perubahan tutupan lahan.

Rehabilitasi Hutan dan Lahan merupakan program yang kompleks, karena menyangkut berbagai aspek, memerlukan jangka waktu yang lama (multiyear), melibatkan berbagai pihak, serta menggunakan sumber daya yang tidak sedikit. Konsekuensi dari kompleksitas tersebut adalah rumitnya manajerial serta tingginya risiko kegagalan pencapaian tujuan RHL. Diperlukan analisis mengenai kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan khususnya pengelolaan Hutan Rakyat agar dapat dirumuskan tantangan atau kendala yang akan dihadapi serta strategi atau kebijakan yang perlu diambil agar penerapan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien.

METODE PENELITIAN

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di wilayah kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Bogor pada bulan Mei tahun 2025.

Alat dan Bahan

Alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain *laptop* dengan perangkat lunak meliputi *Microsoft Word* dan *Microsoft Excel*. Bahan penelitian ini adalah data hasil observasi di lapangan mengenai Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui pembangunan hutan rakyat di wilayah kerja Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Bogor.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara kepada para stakeholder yang terlibat langsung dalam penentuan kebijakan Rehabilitasi Lahan melalui Pembangunan Hutan Rakyat di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I. Wawancara yang

dilakukan merupakan wawancara terstruktur menggunakan kuisioner. Hasil dari wawancara dan pengumpulan data tersebut kemudian dilakukan analisis menggunakan metode analisis SWOT.

Pengolahan dan Analisis Data

Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu pendekatan penelitian yang menggunakan data dalam bentuk angka untuk menjawab pertanyaan penelitian (Waruwu 2025). Metode ini digunakan untuk penentuan bobot dan skor dalam menentukan parameter dalam analisis SWOT metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok (Nana Syaodih Sukadinata 2011:60). Sedangkan metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Bogdan dan Tayloy dalam Lexy L. Moeleong 2011:4). Penggunaan metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan strategi kebijakan (Phadermrod *et al.* 2019) (Astuti *et al.* 2022) Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui Pembangunan Hutan Rakyat di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Bogor.

Pengolahan data dan analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan analisis SWOT. SWOT adalah suatu analisis kebijakan yang diambil berdasarkan kekuatan (*strenghtness*) yaitu melihat apa saja hal-hal yang menjadi kekuatan sebagai modal yang dapat diandalkan, kelemahan (*weakness*) yaitu melihat hal-hal yang dipandang menjadi kelemahan sehingga membentuk prioritas untuk mengatasi kelemahan tersebut, peluang (*opportunities*) yaitu peluang apa saja yang mungkin dapat diraih untuk mengatasi kelemahan dan mendukung kekuatan dan tantangan (*threats*) yaitu hal-hal yang dapat menjadi tantangan baik dilihat dari hal yang positif maupun yang negatif sehingga dapat dijadikan sebagai pemicu meningkatkan prestasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang efektif dan sefisien (Sagala 2013).

Eksternal Internal	O= Peluang (opportunity)	T= Tantangan (treats)
S= kekuatan (strengness)	SO=(max-max) Yaitu strategi yang mampu memanfaatkan secara maksimal(S) dan (O)	ST=(max-min) yaitu strategi yang mampu memanfaatkan secara maksimal (S)dan untuk meminimalkan (T)
W= kelemahan (weakness)	WO= (mini-max) yaitu strategi yang mengurangi W untuk mampu memanfaatkan secara maksimal (O)	WT= (mini-mini) mengurangi kelemahan internal W dan mengurangi T eksternal

Gambar 1 Quadran analisis SWOT (Mukhlisin 2020)

Tahapan analisis SWOT dalam menentukan strategi Kebijakan Rehabilitasi Lahan Kritis melalui Pembangunan Hutan Rakyat di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Bogor adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi kelebihan dan kelemahan yang paling mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Lahan melalui Pembangunan Hutan Rakyat di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Bogor
2. Identifikasi peluang dan ancaman yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Rehabilitasi Lahan melalui Pembangunan Hutan Rakyat di Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Bogor
3. Memasukan butir-butir hasil identifikasi (butir 1 dan 2) ke dalam pola analisis SWOT.
4. Merumuskan strategi-strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, perbaikan, dan pengembangan. Strategi yang perlu dirumuskan untuk memperoleh peluang adalah dengan menggunakan kekuatan (strategi (S-O), strategi untuk mengatasi ancaman dengan menggunakan kekuatan (S-T), strategi untuk mengatasi ancaman dengan memperbaiki kelemahan (Strategi W-T) serta strategi untuk memungkinkan memperoleh peluang dengan memperbaiki kelemahan (Strategi W-O).

Internal Eksternal	Kekuatan (S)	Kelemahan(W)
	Peluang(O)	Ancaman(T)
	Kekuatan/Peluang Memilih Keuntungan	Kelemahan/Peluang Memanfaatkan Peluang
	Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan Dan Pengembangan	
	Mengerahkan Kekuatan/ Kekuatan/ Ancaman	Mengembangkan Ancaman Kelemahan/ Ancaman

Gambar 2 Quadran Perumusan Strategi Pemecahan Masalah, Perbaikan dan Pengembangan melalui Analisi SWOT (Mukhlisin 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rehabilitasi hutan dan lahan terdiri atas rehabilitasi hutan dan rehabilitasi lahan. Rehabilitasi Hutan dilakukan pada kawasan Hutan Konservasi, Hutan Lindung, dan Hutan Produksi. Rehabilitasi lahan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada lahan yang dibebani hak, dan oleh pemegang hak pada lahan yang dibebani hak. Rehabilitasi lahan dilakukan melalui kegiatan Penghijauan dan/atau Penerapan Teknik Konservasi Tanah. Penghijauan dilakukan melalui pembangunan Hutan Hak, Hutan Kota dan/atau Penghijauan Lingkungan. Pembangunan Hutan Hak dilakukan melalui Pembangunan Hutan Rakyat.

Sebaran lahan kritis di Jawa Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan seiring dengan banyaknya alih fungsi lahan. Tingginya laju lahan kritis ini belum dapat diimbangi oleh program Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan yang dialokasikan

dari dana APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Hal ini akan berakibat pada semakin menurunnya kualitas lingkungan melalui peningkatan erosi, sedimentasi, banjir, kekeringan, dan bencana lingkungan lainnya. Oleh karena itu diperlukan analisis untuk menentukan strategi dan arah kebijakan yang dapat mendukung Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan dengan memaksimalkan dukungan dan peluang yang kita miliki untuk meminimalisir kendala dan tantangan yang ditemui di lapangan.

Metode yang digunakan untuk menganalisa kebijakan Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan melalui Pembangunan Hutan Rakyat pada penulisan karya ilmiah ini adalah Metode Analisis SWOT. Proses analisis dalam metode Analisis SWOT dilakukan dengan mengidentifikasi suatu kebijakan, suatu proyek atau suatu rencana bisnis dengan menilai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi jalannya kebijakan mencapai tujuan, kemudian ditentukan faktor mana yang mendukung dan mana yang menjadi penghambat mencapai tujuan tersebut.

Analisa dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi jalannya Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan melalui Pembangunan Hutan Rakyat. Faktor internal tersebut terdiri dari variable pendukung (kekuatan) dan variable kendala (kelemahan), sementara itu Faktor eksternal terdiri dari peluang dan tantangan. Faktor Internal dan Faktor Eksternal jalannya Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I diantaranya:

Faktor Internal :

- Variabel Pendukung (Kekuatan) :

Tabel 1 Variabel Pendukung

Kekuatan (<i>Strenght</i>)
1. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program Pengelolaan Hutan melalui kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan.
2. Adanya Kelompok Tani Hutan yang dibina oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I
3. Adanya tenaga fungsional penyuluh kehutanan
4. Adanya petunjuk pelaksanaan kegiatan atau pedoman sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat

- Variabel Penghambat (Kelemahan) :

Tabel 2 Variabel Penghambat

Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1. Status kepemilikan pada lahan kritis di wilayah CDK I kebanyakan bukan lah hak milik perorangan namun milik korporasi yang tidak termanfaatkan
2. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembangunan Hutan Rakyat
3. Lamanya jangka waktu manfaat yang dirasakan dari kegiatan pembangunan Hutan Rakyat
4. Tidak tersedianya data akurat mengenai sebaran Hutan Rakyat dikarenakan, data yang ada hanya merupakan peta indikatif Hutan Rakyat

- Perhitungan Bobot Faktor Internal dalam tabel IFAS:

Tabel 3 Matriks Kekuatan dan Kelemahan (*Strengths and Weaknesses*) dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Wilayah CDK I

No	KATEGORI	B	P	B X P
<i>Strenght</i>				
1	Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program Pengelolaan Hutan melalui kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan.	0,27	4	1,07
2	Adanya Kelompok Tani Hutan yang dibina oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	0,27	4	1,07
3	Adanya tenaga fungsional penyuluh kehutanan	0,27	4	1,07
4	Adanya petunjuk pelaksanaan kegiatan atau pedoman sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat	0,20	3	0,59
TOTAL				3,08
<i>Weakness</i>				
1	Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembangunan Hutan Rakyat	0,24	3	0,73
2	Lamanya jangka waktu manfaat yang dirasakan dari kegiatan pembangunan Hutan Rakyat	0,18	3	0,55
3	Tidak tersedianya data akurat mengenai sebaran Hutan Rakyat dikarenakan, data yang ada hanya merupakan peta indikatif Hutan Rakyat	0,24	2	0,48
4	Status kepemilikan pada lahan kritis di wilayah CDK I kebanyakan bukan lah hak milik perorangan namun milik korporasi yang tidak termanfaatkan	0,33	1	0,33
TOTAL				2,09

Faktor Eksternal :

- Variebel Peluang :

Tabel 4 Variabel Peluang

Peluang (<i>Opportunities</i>)	
1.	Adanya akademisi yang bergerak dalam bidang kehutanan khususnya penerapan teknologi dalam Pembangunan Hutan Rakyat
2.	Wilayah kerja CDK Wilayah I sebagai penyangga DK Jakarta, sehingga sering mendapatkan program-program pelestarian lingkungan
3.	Tingginya minat masyarakat terhadap wisata alam
4.	Adanya perhatian dari lintas sektor terhadap program pelestarian lingkungan

- Variabel Tantangan :

Tabel 5 Variabel Tantangan

Tantangan (<i>Threats</i>)	
1.	Alih fungsi lahan kritis untuk pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan oleh swasta maupun untuk proyek pembangunan strategis nasional
2.	Tidak adanya payung hukum yang melindungi keberlanjutan Hutan Rakyat karena berada di atas lahan hak milik
3.	Keterbatasan modal yang dimiliki petani dalam pengembangan Hutan Rakyat
4.	Kurangnya kesadaran generasi muda dalam pentingnya pelestarian alam dan keenganan minat generasi muda menjadi petani
- Perhitungan Bobot Faktor Eksternal dalam tabel EFAS:	

Tabel 6 Matriks peluang dan tantangan (*Opportunities and Threats*) dalam Pembangunan Hutan Rakyat di Wilayah CDK I

No	Kategori	B	P	B X P
<i>Opportunities</i>				
1	Wilayah kerja CDK Wilayah I sebagai penyangga DK Jakarta, sehingga sering mendapatkan program-program pelestarian lingkungan	0,26	4	1,06
2	Adanya akademisi yang bergerak dalam bidang kehutanan khususnya penerapan teknologi dalam Pembangunan Hutan Rakyat	0,26	3	0,79
3	Adanya perhatian dari lintas sektor terhadap program pelestarian lingkungan	0,26	3	0,79
4	Tingginya minat masyarakat terhadap wisata alam	0,21	2	0,41
Total				3,06
<i>Threat</i>				
1	Kurangnya kesadaran generasi muda dalam pentingnya pelestarian alam dan keenganan minat generasi muda menjadi petani	0,23	3	0,68
2	Tidak adanya payung hukum yang melindungi keberlanjutan Hutan Rakyat karena berada di atas lahan hak milik	0,28	2	0,55
3	Keterbatasan modal yang dimiliki petani dalam pengembangan Hutan Rakyat	0,23	2	0,45
4	Alih fungsi lahan kritis untuk pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan oleh swasta maupun untuk proyek pembangunan strategis nasional	0,28	1	0,28
Total				1,95

Setelah seluruh variable teridentifikasi maka disusunlah matriks yang didasarkan pada pengurutan masing-masing variable berdasarkan kategorinya berdasarkan bobot serta skala pengaruhnya terhadap jalannya program Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan melalui Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat.

Berikut ini adalah matriks hasil dari analisis tersebut :

Tabel 7 Matriks Analisis SWOT Kebijakan Rehabilitasi Lahan Kritis melalui Pembangunan Hutan Rakyat

	<i>STRENGHT</i>	<i>WEAKNESS</i>
	1. Adanya dukungan anggaran untuk pelaksanaan program Pengelolaan Hutan melalui kegiatan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan.	1. Masih rendahnya pemanfaatan teknologi dalam proses pembangunan Hutan Rakyat
	2. Adanya Kelompok Tani Hutan yang dibina oleh Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I	2. Lamanya jangka waktu manfaat yang dirasakan dari kegiatan pembangunan Hutan Rakyat
	3. Adanya tenaga fungsional penyuluh kehutanan	3. Tidak tersedianya data akurat mengenai sebaran Hutan Rakyat dikarenakan, data yang ada hanya merupakan peta indikatif Hutan Rakyat
	4. Adanya petunjuk pelaksanaan kegiatan atau pedoman sebagai acuan untuk pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat	4. Status kepemilikan pada lahan kritis di wilayah CDK I kebanyakan bukan lah hak milik perorangan namun milik korporasi yang tidak termanfaatkan
<i>Opportunities</i>	<i>STRATEGI SO</i>	<i>STRATEGI WO</i>
1. Wilayah kerja CDK Wilayah I sebagai penyangga DK Jakarta, sehingga sering mendapatkan program-program pelestarian lingkungan	1,07 -1,06	0,73 - 1,06
2. Adanya akademisi yang bergerak dalam bidang kehutanan khususnya penerapan teknologi dalam Pembangunan Hutan Rakyat	1,07 - 0,79	0,55 - 0,79
3. Adanya perhatian dari lintas sektor terhadap	1,07 - 0,79	0,48 - 0,79

program pelestarian lingkungan		
4.Tingginya minat masyarakat terhadap wisata alam	0,59 - 9,41	0,33 - 0,41
Threat	STRATEGI ST	STRATEGI WT
1.Kurangnya kesadaran generasi muda dalam pentingnya pelestarian alam dan keenganan minat generasi muda menjadi petani	1,07 - 0,68	0,73 - 0,68
2.Tidak adanya payung hukum yang melindungi keberlanjutan Hutan Rakyat karena berada di atas lahan hak milik	1,07 - 0,55	0,55 - 0,55
3.Keterbatasan modal yang dimiliki petani dalam pengembangan Hutan Rakyat	1,07 - 0,45	0,48 - 0,45
4.Alih fungsi lahan kritis untuk pembangunan, baik pembangunan yang dilakukan oleh swasta maupun untuk proyek pembangunan strategis nasional	0,59 - 0,28	0,33 - 0,28

Berdasarkan Matriks tersebut dapat ditarik beberapa keadaan yang bias digunakan untuk membuat strategi dengan mengikuti kombinasi keadaan sebagai berikut :

1. Strategi Strength Opportunity (Strategi SO)

Strategi Strength Opportunity (Strategi SO) merupakan penentuan strategi yang dilakukan dengan mendasarkan pada kombinasi dari kekuatan dan kesempatan, implementasi strategi ini dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki agar dapat memanfaatkan peluang semaksimal mungkin.

2. Strategi Weakness Opportunity (Strategi WO)

Strategi Weakness Opportunity (Strategi WO) merupakan penentuan strategi yang dilakukan dengan mendasarkan pada kombinasi dari kelemahan dan kesempatan,

implementasi strategi ini dengan menekan sekecil mungkin terjadinya kondisi dalam faktor kelemahan dengan memanfaatkan peluang semaksimal mungkin.

3. Strategi Strength Threat (Strategi ST)

Strategi Strength Threat (Strategi ST) merupakan penentuan strategi yang dilakukan dengan mendasarkan pada kombinasi dari kekuatan dan ancaman, implementasi strategi ini dengan memanfaatkan kekuatan semaksimal mungkin untuk mengurangi dampak dari ancaman.

4. Strategi Weakness Threat (Strategi WT)

Strategi Weakness Threat (Strategi WT) merupakan penentuan strategi yang dilakukan dengan mendasarkan pada kombisansi dari kelemahan dan ancaman, implementasi strategi ini dengan meminimalkan terjadinya faktor kelemahan dan menghindari ancaman yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hasil analisis SWOT di atas, maka dihasilkan perhitungan dan grafik analisis X dan Y sebagai berikut :

(X,Y)

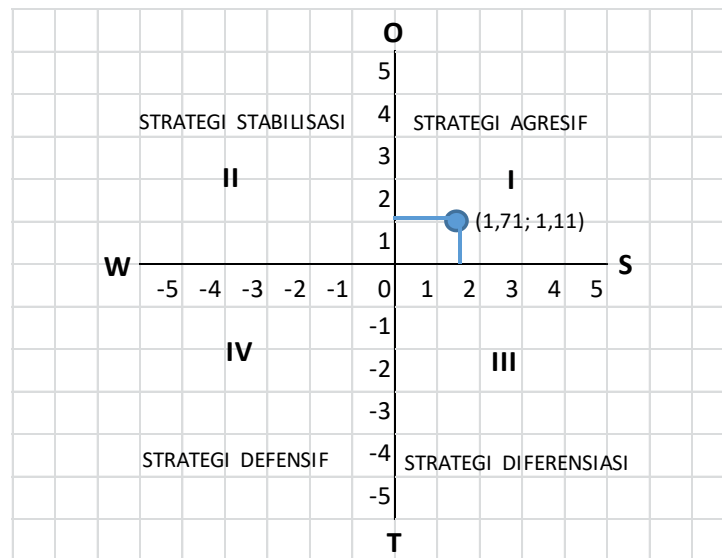
$(S - W) ; (O - T)$

$(3,80 - 2,09) ; (3,06 - 1,95)$

1,71 ; 1,11

(1,71 ; 1,11)

Berdasarkan perhitungan di atas, maka grafik analisis x dan y SWOT sebagai berikut :



Gambar 3 Kuadran Hasil Analisis SWOT

Berdasarkan analisis grafik kuadran SWOT di atas, strategi Kebijakan Analisis Rehabilitasi Lahan melalui Pembangunan Hutan Rakyat pada Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I berada pada kuadran I, yaitu merupakan situasi yang sangat menguntungkan, strategi yang dapat diterapkan adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif.

Dari keempat kombinasi keadaan tersebut didapatkan beberapa strategi yang diharapkan dapat mengoptimalkan jalannya Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan Negara melalui Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat agar jumlah lahan kritis di Jawa Barat semakin menurun serta kesejahteraan petani dapat meningkat.

1. Berkoordinasi dengan pemerintah DKI Jakarta mengenai program dan kegiatan rehabilitasi hulu DAS Ciliwung agar dapat disinkronkan dengan kegiatan Rehabilitasi hutan dan lahan yang ada di CDK Wilayah I khususnya kegiatan Pembangunan atau Penanaman Hutan Rakyat dapat menjangkau lebih banyak area lahan kritis yang ada. Kegiatan pembangunan Hutan Rakyat ini harus melibatkan masyarakat sekitar khususnya generasi muda. Dengan adanya keterlibatan generasi muda program atau kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerapan teknologi dalam proses pengelolaan Hutan Rakyat karena akses informasi yang lebih mudah diakses oleh generasi muda.
2. Pembangunan Hutan Rakyat dari program pemerintah selama ini dilakukan dengan melibatkan Kelompok Masyarakat yaitu Kelompok Tani Hutan (KTH) melalui pola swakelola, hal ini harus didukung dengan peningkatan penerapan teknologi agar meningkatkan keefektifan dan keefisienan pembangunan Hutan Rakyat tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan akademisi yaitu membentuk demplot penelitian atau pun coaching mentoring dari para akademisi mengenai solusi-solusi kendala yang terjadi di lapangan. Dengan keterlibatan akademisi tersebut diharapkan dapat pula menjawab persoalan lamanya jangka waktu manfaat yang dirasakan masyarakat apabila melakukan pembangunan Hutan Rakyat. Masyarakat bisa dikenalkan pada pola Pembangunan Hutan Rakyat melalui pola Agroforestry 4D (Rahman *et al.* 2021) yang memanfaatkan seluruh dimensi lahan agar dapat menghasilkan bagi petani, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang, sekaligus melestarikan alam. Dari sisi aturan hukum juga perlu dirancang payung hukum yang lebih kuat agar keberlanjutan pembangunan Hutan Rakyat ini dapat terus berlanjut sebagai upaya pelestarian lingkungan berkelanjutan.
3. Program Rehabilitasi Lahan Kritis di luar kawasan hutan melalui Kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat didukung oleh adanya Penyuluh Kehutanan sebagai tenaga pendamping. Adanya Penyuluh Kehutanan juga diharapkan dapat berkoordinasi dengan aparat setempat apabila terdapat program desa yang sejalan dengan program pelestarian lingkungan, atau pun pihak-pihak lain yang berpotensi untuk bersedia berkontribusi dalam program pelestarian lingkungan melalui kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat. Dengan adanya kontribusi dari berbagai pihak ini dapat meminimalkan kendala modal petani mengembangkan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat di wilayah mereka. Selain itu, keberadaan penyuluh juga merupakan garda terdepan yang dapat melakukan pengecekan lapangan secara langsung mengenai keakuratan data yang tersedia, oleh karena itu Penyuluh Kehutanan harus dibekali dengan ilmu serta sarana dan prasarana yang menunjang pengecekan lokasi di lapangan. Dengan adanya data yang lebih akurat, maka pengambilan kebijakan pun akan lebih efektif dan efisien.

4. Pelaksanaan kegiatan pembangunan Hutan Rakyat ini mengacu pada pedoman teknis pelaksanaan kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat baik pemilihan lokasi, bibit yang akan ditanam, maupun acuan rancangan pekerjaan yang akan dikerjakan. Penyusunan pedoman pelaksanaan teknis ini diharapkan dapat menjadi jembatan untuk mengatasi kendala yang terjadi di lapangan, misalkan adanya lahan kritis yang berada pada areal kepemilikan korporasi namun tidak dimanfaatkan. Diharapkan dapat dibuat mekanisme kerjasama jangka panjang yang adil bagi kedua belah pihak untuk mengefektifkan penggunaan lahan tersebut agar lebih bermanfaat bagi lingkungan, apalagi saat ini minat masyarakat terhadap wisata semakin meningkat dan dapat dijadikan peluang untuk pemanfaatan jasa lingkungan. Dengan berkembangnya pemanfaatan lahan kritis tersebut diharapkan dapat meminimalisir alih fungsi lahan untuk kepentingan pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan.

SIMPULAN

Simpulan

Dari hasil analisis, dapat disimpulkan beberapa strategi yang dapat ditempuh dalam pengoptimalan jalannya program rehabilitasi lahan melalui pembangunan hutan rakyat yaitu :

1. Berkolaborasi dengan pemerintah DKI Jakarta dalam penanganan Lahan Kritis di hulu DAS Ciliwung.
2. Meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam program Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan melalui sosialisasi media sosial
3. Bekerjasama dengan akademisi untuk secara rutin mengadakan coaching dan mentoring mengenai teknologi yang dapat diterapkan dalam kegiatan Pembangunan Hutan Rakyat
4. Meningkatkan kapasitas Penyuluh Kehutanan serta melengkapi penyuluh dengan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
5. Berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan melalui program CSR dalam rangka mendukung Program Rehabilitasi Lahan Kritis di Luar Kawasan Hutan
6. Menyusun sebuah regulasi atau payung hukum yang dapat menjembatani permasalahan kepemilikan lahan di lapangan serta melindungi keberlanjutan Hutan Rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti R, Nugroho B, Fauzi A. 2022. Strategi keberlanjutan pengelolaan hutan rakyat melalui pendekatan SWOT. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 19(1): 45–56.
- Bogdan, Taylor. 1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remadja Karya.

- Brown S. 1994. Rehabilitation of Tropical Lands: A Key to Sustaining Development. *Restoration Ecology*. 2 (2): 97-111.
- Marinu Waruwu, Siti Natijatul Puát, Patrisia Rahayu Utami, Elli Yanti, Marwah Rusydiana. 2025. Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. 10(1): 918.
- Mukhlisin A, Pasaribu MH. 2020. Analisis SWOT dalam membuat keputusan dan mengambil kebijakan yang tepat. *Jurnal Pusdikra*. 1(1): 33-43.
- Phadermrod B, Crowder RM, Wills GB. 2019. Importance-performance analysis based on SWOT. Decision Making in Strategic Management. *International journal of information management*. 44: 194-203.
- Puspitaloka D. 2023. Institutional challenges in community-based forest management: evidence from West Java. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 20(2), 150–165.
- Rahman, A., et al. (2021). Agroforestry 4D: Empowering rural farmers for climate adaptation. *Jurnal Agroforestri Indonesia*, 4(1).
- Sagala, Saiful. 2013. Administrasi Pendidikan Kontemporer. Bandung: Alfabeta.
- Sukadinata, Nana Syaodih, 2011. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Wulandari, C., & Inoue, M. (2021). The role of social forestry in achieving SDGs in Indonesia. *Land Use Policy*, 101, 105103.